

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDM, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan dapat ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

1.1.1. Capaian Kinerja

Implementasi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Kelautan dan Perikanan (KP) 2020-2024 menitikberatkan pada penyediaan SDM yang kompeten dan mewujudkan pelaku utama mandiri, sadar/peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumber daya KP melalui sinergi kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dalam bentuk *Vocational Goes to Actor* (VOGA), yang terdiri dari pembangunan *Smart Fisheries Village* (SFV atau Desa Perikanan Cerdas), pembangunan *Ocean Institute of Indonesia* (OII) dan sertifikasi kelautan. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan SDM 2020-2024 telah dilakukan evaluasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), pada tahun 2020 mencapai 54,82% dan tahun 2024 mencapai 75,35%. Capaian tersebut dihasilkan dari perhitungan perbandingan lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan masyarakat yang bekerja di bidang KP

dengan lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan masyarakat. Di mana jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP yang dihitung lulusan pada tahun berjalan dengan masa tunggu 6 (enam) bulan dan atau tahun sebelumnya dan jumlah masyarakat KP yang telah dilatih dan menerapkan hasil pelatihannya dan/atau bekerja di DUDI yang dihitung melalui evaluasi setelah pelatihan;

2. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPPSDM tercapai Rp. 18,38 Miliar di tahun 2022 dan meningkat menjadi 49,750 Miliar pada tahun 2024. Capaian ini didapatkan dari kontribusi BPPSDM yang membentuk satuan kerja (satker) Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) serta kegiatan *Smart Fisheries Village* di UPT melalui pemanfaatan aset eks riset/penelitian dan pengembangan (litbang);
3. Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) tercapai sebesar 225 orang pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 441 orang pada tahun 2024.
4. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk sebanyak 3.437 orang pada tahun 2020 dan pada tahun 2024 tercapai sebanyak 4.349 orang. Pembentukan kelompok ditandai dengan penerbitan sertifikat pengukuhan yang ditandatangani oleh pejabat wilayah setempat dan dilaporkan kepada Dinas yang menangani penyuluhan perikanan kabupaten/kota;
5. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya pada tahun 2020 sebesar 1.597 dan meningkat menjadi 2.100 pada tahun 2024;
6. Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPSDM mencapai 15.221 orang pada tahun 2022 dan terjadi peningkatan menjadi 13.310 orang pada tahun 2024;
7. Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) sebanyak 15 desa tahun 2023, dan pada tahun 2024 tercapai 16 desa. Desa mitra dikembangkan menjadi *Smart Fisheries Village* atau Desa Perikanan Cerdas, merupakan program yang dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BPPSDM untuk memperkuat kemandirian desa berbasis usaha perikanan. SFV juga merupakan model pengembangan desa perikanan pintar secara terintegrasi dengan berkolaborasi bersama banyak pihak terkait yaitu pemerintah pusat dan daerah, akademisi, industri, serta masyarakat. SMART sendiri merupakan singkatan dari *Sustainable, Modernization, Acceleration, Regeneration, dan Technology*, sehingga melalui program ini diharapkan akan terbentuk desa-desa perikanan unggulan yang produktif,

mampu menerapkan teknologi informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip keberlanjutan;

8. Sarana dan Prasarana Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 69 unit pada tahun 2024, capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 38 unit. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi BPPSDM dalam mendukung produktivitas sektor KP melalui pelaksanaan kebijakan SDM yang efektif dan kualitas pelaksanaan pengajaran di satuan Pendidikan KP;
9. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM capaian tahun 2020 sebanyak 8 unit dan meningkat menjadi 19 unit yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2024;
10. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI atas Laporan Keuangan (LK) BPPSDM capaian sebesar 0,136 pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 sebesar 0,025.
11. Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sipil Negara (ASN) BPPSDM sebesar 77,88 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 86,23 pada tahun 2024. Indikator ini dihitung berdasarkan penyesuaian bobot kualifikasi, bobot kompetensi, bobot kinerja, bibit disiplin IP ASN;
12. Penilaian Mandiri (PM) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPPSDM sebesar 87,93 pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 88,79 pada tahun 2024;
13. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM sebesar 3,0 pada tahun 2020, dan meningkat sampai tahun 2024 sebesar 3,3;
14. Persentase Unit kerja BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar. Capaian pada tahun 2020 sebesar 98,42% dan capainnya meningkat menjadi 128,33% pada tahun 2024;
15. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM. Capaian sebesar 84,09% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 99,34% pada tahun 2024;
16. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM. Capaian pada tahun 2022 sebanyak 5 proposal, capaiannya mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 80,24. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja ini mengalami perubahan cara pengukurannya yaitu menggunakan formula proposal inovasi yang masuk ke dalam berita acara tim penilai internal KKP dengan nilai

minimum 75, persentase capaian diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata jumlah proposal yang diusulkan dikalikan dengan 100;

17. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPSDM. Capaian pada tahun 2020 sebesar 95,55 capaiannya mengalami peningkatan dan pada tahun 2024 sebesar 96,08;
18. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 95,28.
19. Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) BPPSDM mencapai 77,5 pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 90 pada tahun 2024;
20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM mencapai 75,40 pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 84,29 pada tahun 2024;
21. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mencapai 5.214 orang pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 6.490 orang pada tahun 2024. Perhitungan indikator ini dari aparatur yang diberikan beasiswa, ijin belajar, dan pelatihan aparatur KKP.

1.1.2. Transformasi Penyuluhan dan Pengembangan SDM 2020-2024

Transformasi 1. Penyuluh

.....(dilengkapi oleh Pusluh)

Transformasi 2. *Pembentukan Ocean Institut Of Indonesia (OII)*

.....(dilengkapi oleh Pusdik)

Transformasi 3. *Corporate University* dan Pelatihan

1. Pengembangan Kompetensi ASN KKP berbasis Knowledge Management menuju ASN KP Corporate University;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kepelatihan dan spesialisasi kompetensi tenaga kepelatihan;
3. Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri, standar nasional dan internasional;
4. Membangun sistem informasi terintegrasi;
5. Revitalisasi dan modernisasi sarana dan prasarana pelatihan;
6. Optimalisasi kerjasama dengan K/L lain, NGO, praktisi, akademisi, industri, pelaku usaha, Media, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan negara lain mendukung peningkatan SDM KP;
7. Peningkatan Akses dan Inklusivitas Pelatihan;
8. Penguatan Regulasi terkait Pelatihan ASN dan Masyarakat KP;

9. Puslat KP sebagai pengakreditasi program pelatihan sektor kelautan dan perikanan.

Transformasi 4. Proses Sertifikasi Kompetensi SDM KP sebagai *Core Business* BPPSDM KP

1. Pembentukan Lembaga sertifikasi independent sektor KP;
2. Penyiapan standar sertifikasi kompetensi SDM KP selaras dengan kebijakan nasional dan internasional;
3. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk manajemen sertifikasi;
4. Peningkatan Kualitas Lembaga Sertifikasi dan Asesor kompetensi;
5. Pengembangan Skema sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan industri kelautan dan perikanan dan berjenjang
6. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mengintegrasikan skema sertifikasi ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan;
7. Revitalisasi dan modernisasi sarana dan prasarana kegiatan sertifikasi kompetensi;
8. Optimalisasi kerjasama dengan K/L lain, NGO, praktisi, akademisi, industri, pelaku usaha, Media, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan negara lain mendukung sertifikasi SDM KP;
9. Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi sertifikasi kompetensi;
10. Penguatan Regulasi terkait Sertifikasi Kompetensi sektor KP;

Transformasi 5. Desa Perikanan Cerdas (*Smart Fisheries Village*)

.....(dilengkapi oleh Pusluh)

1.2. Potensi dan Permasalahan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.2.1. Potensi dan Permasalahan Penyuluhan KP

..... (dilengkapi oleh Pusluh)

1.2.2. Potensi dan Permasalahan Pendidikan KP

..... (dilengkapi oleh Pusdik)

1.2.3. Potensi dan Permasalahan Pelatihan KP

1. Terbatasnya jumlah Lembaga Pelatihan KP
2. Belum terakreditasinya program pelatihan sektor KP secara menyeluruh
3. Kurangnya tenaga kepelatihan yang kompeten

4. Masih terjadi duplikasi peran antara tenaga pelatih dengan pengelola kepelatihan
5. Belum adanya standar dan grand desain sarana dan prasarana sesuai program pelatihan.
6. keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan
7. Belum terintegrasinya sistem informasi terkait pengelolaan program pelatihan
8. Belum optimalnya Kerjasama dengan industri dalam dan luar negeri untuk pengembangan program pelatihan
9. Baru satu negara yang meratifikasi STCWF memiliki Kerjasama MRA dengan Indonesia
10. Keterbatasan jaringan Kerjasama dengan NGO dan negara lain
11. Keterbatasan sumberdaya untuk penyelenggaran pelatihan
12. Kurangnya promosi dan penyebaran informasi pelatihan serta sosialisasi peraturan melalui media.
13. Kepatuhan penerapan regulasi
14. Peraturan Menteri yang sudah terbit belum semua disertai dengan peraturan turunannya
15. Terbatasnya perangkat pembelajaran program pelatihan sektor KP

1.2.4. Potensi dan Permasalahan Standarisasi dan Sertifikasi KP

1. Terbatasnya jumlah Lembaga Sertifikasi KP
2. Belum seluruhnya standar sertifikasi kompetensi SDM KP selaras dengan kebijakan nasional (seperti Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia/SKKNI) dan standar internasional
3. Kurangnya tenaga asesor dan pengelola standarisasi dan sertifikasi
4. Belum adanya standar dan grand desain sarana dan prasarana kegiatan standarisasi dan sertifikasi.
5. keterbatasan sarana dan prasarana standarisasi dan sertifikasi
6. Belum terintegrasinya sistem informasi terkait pengelolaan standarisasi dan sertifikasi
7. Belum optimalnya Kerjasama dengan industri dalam dan luar negeri, NGO dan Stakeholder lainnya untuk pengembangan standarisasi dan sertifikasi
8. Baru satu negara yang meratifikasi STCWF memiliki Kerjasama MRA dengan Indonesia
9. Kurangnya promosi dan penyebaran informasi standarisasi dan sertifikasi serta sosialisasi peraturan melalui media.

10. Kepatuhan penerapan regulasi

11. Peraturan Menteri yang sudah terbit belum semua disertai dengan peraturan turunannya

1.3. Analisis Lingkungan Strategis

BPPSDM memiliki mandat untuk menyiapkan sumber daya manusia KP yang kompeten melalui penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, serta pelatihan yang dilakukan terpadu dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Mandat tersebut harus diikuti penyusunan rencana strategis yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Hal ini akan mempengaruhi pencapaian kinerja pembangunan sektor KP di Indonesia melalui pengembangan SDM yang kompeten.

Lingkungan strategis ini secara teoritis dapat diartikan sebagai situasi strategis baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan BPPSDM tahun 2025-2029. Situasi strategis bersumber dari faktor internal (*Internal Factor Strategic*) dan eksternal (*External Factor Strategic*) yang bersifat statis maupun dinamis yang tercakup dalam perspektif wilayah (sektoral, regional, nasional, dan global).

Lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal dan eksternal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan, yaitu kapasitas sumber daya manusia terutama berkaitan dengan pendayagunaan peran strategis sumber daya manusia perikanan sebagai penentu keberhasilan kegiatan di sentra-sentra kelautan dan perikanan.

Faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan, antara lain:

- a. memiliki SDM (penyuluh, guru/dosen, instruktur, widyaiswara, assesor dan staf pendukung) yang kompeten;
- b. adanya peraturan perundangan terkait penyuluhan, pendidikan dan pelatihan;
- c. kemampuan untuk menjaring kerja sama riset dalam dan luar negeri;
- d. kemampuan menghasilkan inovasi IPTEK yang sesuai kebutuhan;
- e. menghasilkan lulusan diklat vokasi yang dibekali sertifikat kompetensi;
- f. produk Sertifikasi Kompetensi yang sudah diakui oleh DUDI;
- g. kemampuan menyelenggarakan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan terpadu; dan
- h. kelembagaan pendidikan dan pelatihan yang sudah terakreditasi dan bersertifikat *International Organization for Standardization* (ISO) 9001: 2015.
- i. Jaringan Lembaga Pelatihan yang Luas;
- j. Program Pelatihan yang Beragam
- k. Adanya aplikasi E-Laut untuk integrasi pengelolaan data pelatihan
- l. Kemitraan Strategis Nasional dan Internasional

Faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kelemahan antara lain :

- a. sarana prasarana penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan yang tersedia masih memerlukan revitalisasi;
- b. rasio pelaku utama/usaha terhadap jumlah penyuluh dan penyebarannya belum memadai;
- c. peran penyuluh dalam mendampingi pelaksanaan program pembangunan KP belum optimal;
- d. dunia industri belum sepenuhnya memberikan pengakuan terhadap kompetensi SDM; dan
- e. kurikulum pendidikan belum memenuhi kebutuhan DUDI.
- f. Keterbatasan SDM Kompeten
- g. Akreditasi Program Diklat belum optimal
- h. Regulasi Belum lengkap

Faktor strategis lingkungan eksternal yang menjadi peluang antara lain:

- a. kemajuan IPTEK untuk pengembangan inovasi KP;
- b. era Industri 4.0 dan *Society* 5.0;
- c. SDM unggul dan berdaya saing sebagai prioritas kebijakan pembangunan nasional;
- d. Jejaring SDM di seluruh wilayah Indonesia;
- e. sumber daya Kelautan dan Perikanan masih dapat dioptimalkan; dan
- f. kerja sama lintas sektoral dan lembaga terkait penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.
- g. Kerja sama internasional
- h.

Faktor strategis lingkungan eksternal yang menjadi ancaman antara lain:

- a. persaingan dengan tenaga kerja dari luar negeri di era perdagangan bebas, dan
- b. adanya persyaratan kompetensi bagi tenaga kerja kelautan dan perikanan yang tersertifikasi.
- c. Adaptasi perubahan teknologi

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam rancangan RPJMN yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut menekankan

bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

2.2. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 untuk melaksanakan misi Menteri Kelautan dan Perikanan, BPPSDM melaksanakan 2 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

1. **“Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 2**, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
2. **“Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 4**, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

2.3. Tujuan

Tujuan dari penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan dalam Rencana Strategis BPPSDM Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan.....

2. Meningkatnya pelayanan pendidikan
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan produktifitas tenaga kerja
4. Meningkatnya pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing; dan
5. Meningkatnya kinerja reformasi birokrasi di lingkungan BPPSDM guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis (SS) Pembangunan kelautan dan perikanan yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP dari sektor SDM ada pada SS-4 “Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten”. Untuk mendukung SS-4 tersebut, BPPSDM menjabarkan kedalam Sasaran program (SP) dan Indikator Sasaran Program (ISP) yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

SP-1 : Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan indikator :

1. Persentase Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja
2. Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja
3. Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya

SP-2 : Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat, dengan indikator :

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat
2. Desa Perikanan Cerdas / Smart Fisheries Village (SFV) yang Menerapkan Ilmu dan Pengetahuan Teknologi Hasil Kelautan dan Perikanan
3. Percontohan Penyuluhan dan Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan

SP-3 : Terselenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan indikator :

1. Aparatur Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya
2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
3. Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitasnya

4. Lembaga Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi/Terakreditasi
5. Hasil Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

SP-4 : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP, dengan indikator :

1. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (RB)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rancangan RPJMN tahun 2025-2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia berkualitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Arah kebijakan tersebut merupakan program presiden terpilih dan arah pembangunan jangka panjang nasional.

Sasaran utama pembangunan nasional ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2025-2029. Target yang akan dicapai pada tahun 2029 adalah:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju

GNI Per Kapita : 7.400-8.240 USD

Kontribusi PDB Maritim : 9,1%

Kontribusi PDB Manufaktur : 21,9%

2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

4,5-5% (tingkat kemiskinan ekstrim 0%* di tahun kedua)

Rasio Gini 0,372-0,375

Kontribusi PDRB KTI 23,3 %

3. Kepemimpinan dan Pengaruh Dunia Internasional Meningkat

Global Power Index berada di ranking 29

4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

Indeks Modal Manusia (IMM) mencapai 0,59

5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*

Penurunan intensitas emisi GRK menjadi 62,37%

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 77,20

Tahun 2025-2029 merupakan pentahapan pertama dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Tahap pertama RPJPN bertujuan untuk membentuk penguatan transformasi. Pada tahap pertama ini, diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, kemiskinan menuju 0%, dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Adapun prasyarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yaitu:

1. Menciptakan Sumber Pertumbuhan Baru Sisi Produksi (*Supply Side*) melalui:

- a) Peningkatan produktivitas produksi pangan antara lain melalui: program ekstensifikasi dan intensifikasi, serta modernisasi pertanian, Program Lumbung Pangan Desa, Pembukaan *food estate*, Pengembangan ekonomi biru.
- b) Pembangunan industri pengolahan bersifat *broad-based* terpilih antara lain melalui: industri padat karya, kimia dasar, dan semi konduktor, hilirisasi berbasis sumber daya mineral penting, dan sumber daya alam.
- c) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru melalui Kawasan Investasi, Kawasan Ekonomi Khusus, DPP berserta infrastruktur penunjang
- d) Program peningkatan aktivitas wisatawan bernilai tambah tinggi melalui: Pengembangan destinasi, dan penciptaan event berkualitas
- e) Peningkatan sumber daya manusia berkualitas melalui program pembangunan sekolah unggulan, rumah sakit berkualitas, dan makan bergizi gratis

2. Menciptakan sisi permintaan (*demand side*) didukung oleh sektor riil, eksternal, fiskal, moneter, dan keuangan melalui:

- a) Menjaga konsumsi masyarakat,
- b) Meningkatkan investasi yang berkualitas,
- c) kebijakan fiskal yang adaptif,
- d) peningkatan ekspor dan terintegrasinya rantai nilai domestik dan global,
- e) dukungan kebijakan moneter, serta
- f) mendorong partisipasi swasta dan *innovative financing*.

Yang didukung dengan reformasi struktural melalui reformasi birokrasi dan deregulasi untuk mempermudah perizinan berusaha, mengurangi potensi korupsi, dan fleksibilitas pasar tenaga kerja.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% harus diiringi dengan penurunan kemiskinan. Diharapkan pada tahun 2029 kemiskinan dapat ditekan sebesar 4,5 – 5 % dengan tingkat kemiskinan ekstrim 0% tercapai di tahun 2026. Selain itu ,proporsi kelas menengah dapat tumbuh menjadi 38% melalui:

- 1) Pemberdayaan ekonomi berkelanjutan dan inovatif melalui kartu usaha produktif dan afirmatif
- 2) Perlindungan sosial yang integratif, adaptif, dan inklusif melalui kartu kesejahteraan
- 3) Peningkatan akses pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, transportasi, pangan, dan perumahan, dan
- 4) Program kewilayahan, konektivitas, pasar kerja, dan lainnya.

Target pertumbuhan ekonomi serta penurunan kemiskinan tersebut akan tercapai apabila kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan dimana indeks modal manusia diharapkan dapat meningkat menjadi 0,61 pada tahun 2029 melalui:

1. Peningkatan layanan dasar
 - Wajib belajar 13 tahun
 - Penuntasan tuberculosis
 - Pembangunan rumah sakit
 - Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
 - Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan
2. Peningkatan modal manusia
 - Makan bergizi untuk siswa dan ibu hamil
 - Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul
 - Revitalisasi sarpras sekolah
 - Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
3. Peningkatan modal sosial budaya
 - Pendidikan karakter, kewargaan, agama, dan budaya
 - Pendidikan keluarga dan pengasuhan

Tahapan pertama penguatan transformasi tahun 2025-2029 dijabarkan melalui pelaksanaan Prioritas Nasional yang merupakan Misi Asta Cita dari Pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kementerian Kelautan dan Perikanan ditugaskan untuk melaksanakan program nasional sebagai berikut:

Tabel Mandat Kepada KKP Dalam RPJMN 2025-2029

No	Prioritas Nasional (PN)	Poin Penting Asta Cita	Intervensi KKP	Rancangan Proyek Strategis
1	PN 2-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Swasembada pangan	1. Kawasan sentra produksi pangan 2. Pengembangan lumbung pangan nasional 3. Modernisasi digitalisasi data pangan 4. Subsidi pupuk, akses benih, irigasi pertanian, alat mesin pertanian 5. Pengembangan pangan lokal, pangan hewani dan pangan akuatik 6. Biofortifikasi dan fortifikasi pangan 7. Fasilitasi akses pembiayaan untuk pelaku usaha budi daya dan nelayan.	1. Pengembangan klaster pangan akuatik unggulan 2. Pengembangan lumbung pangan desa: ikan, udang, dan rumput laut

No	Prioritas Nasional (PN)	Poin Penting Asta Cita	Intervensi KKP	Rancangan Proyek Strategis
		Ekonomi Biru	1. Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, pelabuhan perikanan modern, dan armada perikanan tangkap ZEE 2. Pengembangan pangan akuatik: Klaster pangan akuatik unggulan dan lumbung pangan desa: ikan, udang, Rumput Laut 3. Pengembangan industri berbasis sumber daya laut dan perairan	1. Konservasi & pengembangbiakan spesies terancam punah 2. Pengembangan pelabuhan perikanan modern dan armada perikanan tangkap di ZEE 3. Pengembangan industri berbasis sumber daya laut dan perairan
2	PN-3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Dukungan terhadap pengembangan destinasi wisata prioritas dan regeneratif (Borobudur, Prambanan, Bali, Kepri, Jakarta, Lombok-Gili Tramenan)	
		Produktivitas UMKM dan Koperasi	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	
3	PN-4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Pendidikan dan Kesehatan	1. Peningkatan relevansi dan perluasan akses perguruan tinggi 2. Pengembangan inovasi pembelajaran 3. Program prioritas makan bergizi gratis 4. Penurunan angka stunting	1. Makan bergizi di sekolah dan pesantren 2. Pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
4	PN-5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Konektivitas Backbone dan Logistik	Penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik	
		Ekonomi Domesik dan Global	Peningkatan ekspor produk perikanan dan industri berbasis SDA	Hilirisasi Rumput Laut
		Hilirisasi	Mengembangkan kawasan hilirisasi komoditas hasil penangkapan dan budidaya yang berkelanjutan	
			Meningkatkan investasi melalui promosi dan pendampingan investasi, serta kemudahan perizinan berusaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	
5		Kemiskinan	Kartu usaha	Kartu usaha afirmatif

No	Prioritas Nasional (PN)	Poin Penting Asta Cita	Intervensi KKP	Rancangan Proyek Strategis
	PN-6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perdesaan	Penguatan Ekonomi Lokal, Ketahanan Sosial, dan Pelestarian Lingkungan Pedesaan	
6	PN-7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Hukum, Birokrasi, dan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1. Reformulasi urusan konkuren 2. Penguatan tata kelola regulasi 3. Pencegahan dan pemberantasan korupsi	
7	PN-8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pembangunan Berketahanan Iklim dan Pengelolaan Risiko Bencana	1. Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut 2. Resiliensi Masyarakat	

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029, pencapaian target-target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, dan peta jalan Ekonomi Biru maka kerangka pikir pembangunan kelautan dan perikanan didasari oleh perubahan mindset pembangunan sektor kelautan perikanan dari pembangunan berorientasi produksi menjadi pendekatan pembangunan secara terukur yang mempertimbangkan daya dukung dan berorientasi pasar dengan menempatkan ekologi sebagai panglima untuk mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional 2025-2029.

Kebijakan pembangunan ekonomi biru dilandasi oleh empat aspek yaitu:

1. Sektor kelautan dan perikanan sebagai *main system* pembangunan nasional

Untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang didorong untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional maka sektor kelautan dan perikanan harus menjadi *leading sector* yang harus didukung oleh sektor lainnya dalam setiap konteks pembangunan nasional.

2. Ekologi sebagai panglima

Pembangunan kelautan dan perikanan memprioritaskan pada perlindungan laut untuk memberikan ruang hidup bagi sumberdaya hayati yang ada di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber pangan serta memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Laut merupakan episentrum serapan karbon dunia yang berkontribusi pada keberlangsungan hidup manusia dan pencegahan perubahan iklim dan gas

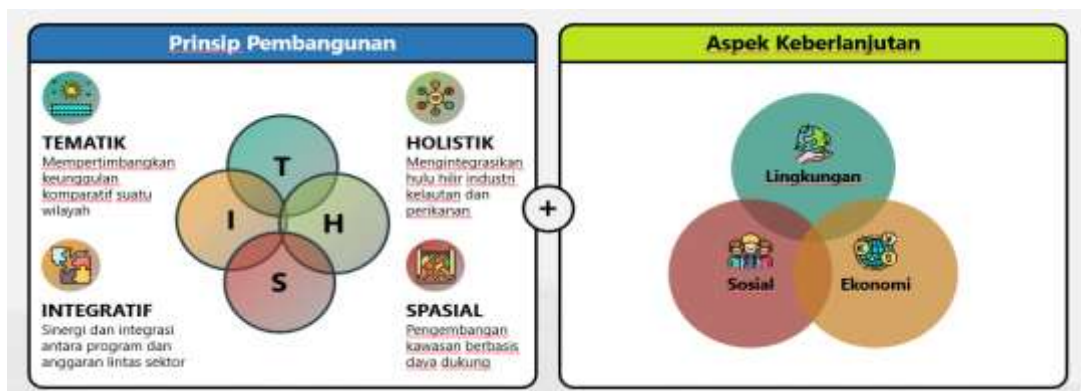
rumah kaca. Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki harus dioptimalkan secara berkelanjutan sehingga menjadi *champion* di pasar global.

3. *Market driven oriented*

Pembangunan kelautan dan perikanan harus dapat mudah beradaptasi terhadap tuntutan pasar domestik dan global sehingga daya saing kompetitif dan komparatif harus terus ditingkatkan.

4. Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, mengakses informasi secara akurat dan *real-time*, serta mendorong pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan antara lain: pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi, pemanfaatan teknologi satelit, serta teknologi lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.



Gambar 5. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Biru

Sumber: KKP, 2024

Selain itu, pembangunan kelautan dan perikanan memperhatikan 4 prinsip pembangunan yaitu; 1) **Tematik**, mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah; 2) **Holistik**, mengintegrasikan hulu hilir industri kelautan dan perikanan; 3) **Integratif**, sinergi dan integrasi antara program dan anggaran lintas sektor; dan 4) **Spasial**, pengembangan kawasan berbasis daya dukung secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan 3 aspek keberlanjutan yaitu; sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Maka, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 adalah:

1. Perluasan kawasan konservasi perairan

Kebijakan perluasan kawasan konservasi merupakan instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya hayati kelautan dan perikanan. Kawasan konservasi berfungsi sebagai ekosistem bagi sumber daya hayati yang hidup di dalamnya. Kawasan konservasi yang sehat dapat memberikan dampak positif yaitu: terlindunginya habitat, menjaga struktur ekosistem, meningkatkan kemampuan

penyerapan karbon, dan meningkatkan potensi sumber daya ikan melalui *spillover*. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan luas kawasan konservasi laut menjadi 30% pada tahun 2045 atau setara dengan 97,5 juta ha kawasan konservasi laut.

2. Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan

Kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan upaya KKP dalam mewujudkan tata kelola perikanan tangkap berkelanjutan melalui transformasi pengelolaan perikanan berkelanjutan. Kebijakan ini menjaga kelestarian stok sumber daya ikan melalui penangkapan ikan berbasis kuota sesuai dengan daya dukung dari setiap zona penangkapan (Trenggono, 2023).

3. Pengembangan perikanan budi daya laut, pesisir, dan tawar (darat) yang ramah lingkungan

Kebijakan pengembangan perikanan budi daya laut, pesisir, dan tawar yang ramah lingkungan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan akuatik sebagai sumber pangan masa depan yang dapat diproduksi secara berkelanjutan. Melalui kebijakan ini akan diterapkan cara-cara berproduksi perikanan budi daya sesuai dengan standar dan ramah lingkungan pada sentra-sentra produksi perikanan budi daya sebagai lumbung pangan.

4. Pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan

Kebijakan pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bertujuan untuk melindungi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, menata dan mengelola pemanfaatan ruang laut, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

5. Pembersihan sampah plastik laut melalui gerakan partisipasi nelayan

Kebijakan Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan bertujuan untuk membersihkan sampah laut dari sampah plastik, mencegah sampah baru ke laut, serta membentuk ekonomi sirkuler dalam pengendalian dan penanganan sampah plastik di laut. Kebijakan ini mendorong partisipasi serta kesadaran masyarakat pesisir untuk membersihkan sampah plastik di laut dan menjaga kebersihan laut. Nelayan mengumpulkan sampah plastik yang ditemukan selama aktivitas melaut dan mengangkutnya kembali ke daratan untuk didaur ulang menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi.



Gambar..... Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

3.3. Arah Kebijakan Pengembangan Sumber daya Manusia

Dalam rangka mendukung arah kebijakan Pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2025-2029, BPPSDM melakukan tranaformasi dibidang penyuluhan, pendidikan dan pelatihan untuk memastikan bahwa target visi Kementerian Kelautan da Perikanan “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dapat tercapai dengan baik.

A. Penyuluhan KP

.....

B. Pendidikan KP

.....

C. Pelatihan KP

Menjadikan ASN dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan KP yang Kompeten, Berdaya Saing, Inovatif dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman

D. Sertifikasi dan Standarisasi SDM KP

Membangun SDM KP yang kompeten, berdaya saing, dan berintegritas melalui penguatan standar kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri, kebijakan nasional, dan tantangan global, serta penyelenggaraan sertifikasi yang terpercaya, transparan, dan diakui secara nasional maupun internasional

3.4. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia, BPPSDM mengusulkan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
2. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan 2025-2029
4. Pencabutan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

Urgensi pembentukan/penyempurnaan masing-masing Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagai usulan kerangka regulasi BPPSDM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Urgensi pembentukan :

- ketentuan pada UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sudah tidak relevan dengan perkembangan kegiatan penyuluhan perikanan
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa kewenangan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional merupakan urusan pemerintah pusat. Hal ini menjadi landasan yuridis bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dilaksanakan oleh pemerintah pusat
- UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang, istilah Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan yang sebelumnya terdapat dalam beberapa peraturan perundangundangan tentang kelautan dan perikanan diubah dengan istilah Pelaku Usaha
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN KP/2011 tentang Programa Penyuluhan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan sebagai turunan dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.

2. Penerapan Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia

Urgensi pembetulan :

Mengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang terkait pengaturan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi

3. Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan 2025-2029

Urgensi pembentukan :

- upaya strategis pemutahiran program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi serta sertifikasi kompetensi di Indonesia dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kompeten, professional di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan standar kompetensi kerja;
- untuk keseragaman pemenuhan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia diperlukan perencanaan pengembangan standar kompetensi kerja Nasional Indonesia bidang kelautan dan perikanan; dan
- Pemetaan kompetensi disetiap sektor atau kategori lapangan usaha untuk mengidentifikasi dan memetakan unit unit kompetensi dari suatu sektor atau kategori lapangan usaha yang perlu disusun sebagai prioritas penyusunan dan pengembangan SKKNI tahun 2024- 2029
- Pokok materi yang diusulkan terkait dengan : 1) peta kompetensi sektor Kelautan dan Perikanan, 2) Program prioritas penyusunan SKKNI berdasarkan skala prioritas, 3) konektivitas dengan proses bisnis kelautan, 4 kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta 5) usulan Rencana Induk Pengembangan SKKNI sektor KP.

4. Pencabutan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

Urgensi pencabutan :

- Telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan

3.5. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun

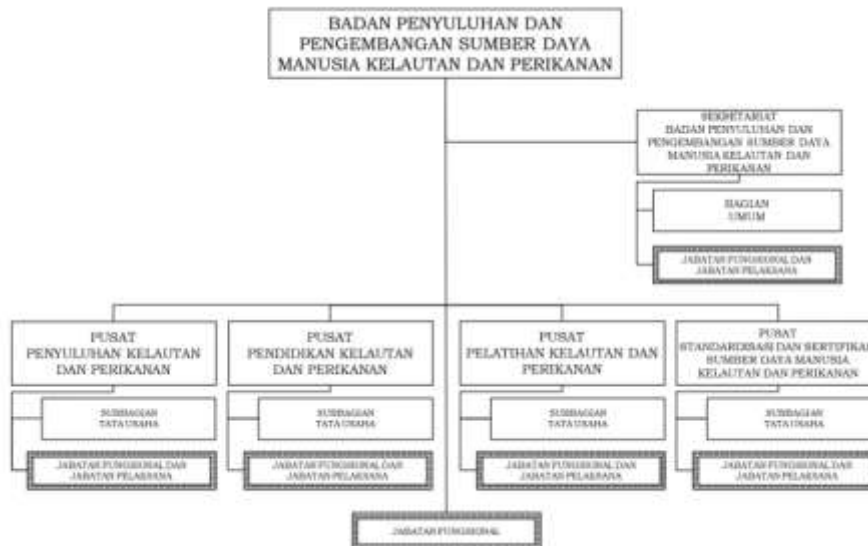
dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
2. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundangan-undangan;
3. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan; dan
4. Tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Kerangka kelembagaan dalam perencanaan strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat internal maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Kelembagaan yang dikembangkan harus tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri tersebut, BPPSDM mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Dalam rangka melaksanakan program dan kebijakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan diperlukan penataan kelembagaan agar dalam melaksanakan tugas tersebut dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien guna melahirkan organisasi yang proporsional, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip *good governance*. Penataan kelembagaan BPPSDMKP akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, disamping itu akan dilakukan penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis di daerah sesuai dengan fungsinya. Penataan kelembagaan selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian dan *redesign* nomenklatur program dan kegiatan. Selain itu, penguatan kapasitas SDM juga dilakukan, terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu.



BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis diukur menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	SS 1. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi, Serta Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir Dan Laut	1	Tingkat pengelolaan konservasi (nilai)	63,7	65	66,2	67,5	68,7
2	SS 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan Perikanan	2	Nilai kontribusi sektor kelautan terhadap PDB maritim (triliun rupiah)	2,25	2,50	2,75	2,85	3,00
		3	Pertumbuhan PDB perikanan (%)	4-6	4-6	6-7	7-8	8
		4	Volume produksi perikanan (juta ton)	24,58	25,86	27,27	28,75	30,18
		5	Indeks Pembangunan Pulau	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
			Pulau Kecil (Skala 0 - 1)					
		6	Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir (%)	19,05	38,78	58,51	78,24	100
		7	Indeks Kepatuhan sektor Kelautan dan Perikanan (indeks)	80,67	81	81,33	81,67	82
		8	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada pada batas biologis yang aman (%)	<80	<80	<80	<80	<80
3	SS 3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	9	Nilai Ekspor Produk Perikanan (USD Miliar)	6,25	6,7	7,2	7,8	8,5
		10	Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	26,26	26,85	27,44	28,04	28,63
		11	persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan (%)	70	72	74	76	80
4	SS 4. Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	12	persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (%)	75	76	77	78	79
5	SS 5. Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas	13	Indeks Reformasi Birokrasi KKP (indeks)	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25

4.2. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan indikator kinerja program dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan beberapa unit organisasi Kementerian/Lembaga setingkat Eselon I.

Indikator sasaran program BPPSDM diturunkan dengan metode direct maupun non direct dengan mengacu pada Indikator Sasaran Strategis KKP tahun 2025-2029 sebagai berikut :

No	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	SP 1. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	persentase Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Tersekap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (%)	85	85	85	85	85
			persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Tersekap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (%)	75	76	77	78	79
			Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya (%)	6,5				
		SP 2. Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat (Paket)t	54	84	89	95	100
			Desa Perikanan Cerdas (<i>Smart Fisheries Village</i>) yang Menerapkan Ilmu dan Pengetahuan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Desa)	1	18	19	20	21
			Jumlah Percontohan Penyuluhan dan Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Kelompok)	17	29	35	40	45
		SP 3 Terselenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Aparatur Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya (orang)	550	580	600	615	630

No	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
			Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (NSPK)	13	28	31	34	36
			Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Paket)	17	86	86	91	91
			Lembaga Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi/Terakreditasi (Lembaga)	26	31	36	41	46
			Hasil Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Laporan)	1	10	10	10	10
5	Program Dukungan Manajemen	SP 7. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel BPPSDMKP	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup BPPSDMKP (nilai)	86	86,5	87	87,5	88

4.3 Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan berupa keluaran (*output*) yang dibiayai oleh anggaran (*input*). Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara *specific, measurable, achievable, reliable, and timebond (smart)*.

Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di BPPSDMKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja lingkup BPPSDM dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel xx.....

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	Jumlah Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	26.908	27.930	28.875	29.640	30.613
			Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	35.877	36.750	37.500	38.000	38.750
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	2.750	2.850	2.950	3.050	3.150
		Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Jumlah Materi Pelatihan Kelautan dan Perikanan Berbasis Kaji Widya (Paket)	14	15	16	17	18
		Terselenggaranya Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) di lingkup Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) yang Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi lingkup Pelatihan Kelautan dan Perikanan	5	5	5	5	5
	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	Peserta Didik yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
			Peserta Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI)	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
		Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	23	23	23	23	23
			Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan	14	14	14	14	14
		Terselenggaranya Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) di	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) yang	3	3	3	3	3

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
		Lingkup Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi lingkup Pendidikan Kelautan dan Perikanan					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan KP Yang Terstandar	Peralatan dan Mesin Serta Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	2	2	2	2	2
			Prasarana Pendidikan Menengah dan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Paket)	2	2	2	2	2
		Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Kelembagaan Publik Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terakreditasi	16	16	16	16	16
			Tenaga Pendidik Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi	500	505	510	515	520
			Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Kelautan dan Perikanan	6	6	6	6	6
			Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terkelola	16	16	16	16	16
	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
			Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
			Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
		Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta	Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	1	1	2	2	2

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
		Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan	5	15	20	25	30
			Jumlah Inovasi yang diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	3	3	5	5	7
		Terselenggaranya Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) di lingkup Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) yang Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	4	4	4	4	4
			Jumlah Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	5	6	6	7
		Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	5	6	6	7
			Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang Disusun	3	3	4	4	5
			Jumlah Penyuluh Perikanan yang Kompeten	50	50	50	50	50
			Jumlah Hasil Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP	1	1	2	2	2
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, agile dan akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP (Indeks)	79	79,5	80	80,5	81
			Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDMKP	16	17	18	19	20
			Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5
			Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP	77	77,5	78	78,5	79

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
			Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDMKP	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
			Persentase Unit Kerja BPPSDMKP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94	94,5	95	95,5	96
			Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP	80	80,5	81	81,5	82
			Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP	76	76,5	77	78,5	79
			Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP	93,76	93,80	93,90	94,00	94,10
			Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDMKP	80	81	82	83	84
			Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDMKP	80	81	82	83	84
		Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal BPPSDMKP	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana BPPSDMKP tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana BPPSDMKP tepat waktu	Persentase pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan lingkup BPPSDMKP tepat waktu	100	100	100	100	100

4.4. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah APBN, swasta, perbankan dan nonperbankan, masyarakat, dunia usaha, serta sumber pendanaan lain yang sah. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit yang disalurkan melalui perbankan atau Lembaga pengelola dana bergulir lainnya. Selain itu juga dilakukan

langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*) antara lain seperti Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance*, *Blue Finance* transfer/hibah ke daerah, *Grant Budget Support Aids*, Kreditor Swasta Asing (KSA), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029 untuk bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia.

Dokumen Renstra BPPSDM 2025-2029 dijadikan acuan dan arahan bagi Unit Kerja di lingkup BPPSDM dalam merencanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan periode 2025-2029 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Penyusunan Renstra BPPSDM mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029. Rencana Strategis BPPSDM ini disusun untuk memetakan dan menjawab berbagai persoalan dan tantangan serta dinamika yang terjadi sepanjang tahun 2025-2029. Namun demikian, mengingat dinamisnya perubahan serta adanya tuntutan pengembangan organisasi dan masyarakat, sangat mungkin ada hal-hal yang belum terakomodasi.

Selanjutnya guna mendukung peran strategis BPPSDM dalam melakukan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan maka dibutuhkan peningkatan kelembagaan melalui penataan regulasi dan peningkatan sumber daya KP.

a. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program. Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, BPPSDM telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I A, sebagaimana Lampiran II.

b. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di BPPSDM merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja lingkup BPPSDM, sebagaimana Lampiran II.

2. Kerangka Pendanaan

Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Renstra mengusulkan rencana pendanaan melalui APBN tahun 2020-2024 dan PNPB Tahun 2020-2024. Anggaran tersebut akan didistribusikan setiap tahunnya untuk membiayai Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagaimana Lampiran II.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) 2020-2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 untuk bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia. Dokumen Renstra BPPSDM 2020-2024 dijadikan acuan dan arahan bagi Unit Kerja di lingkup BPPSDM dalam merencanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan periode 2020-2024 secara menyeluruh, integrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Penyusunan Renstra BPPSDM mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024. Rencana Strategis BPPSDM ini disusun untuk memetakan dan menjawab berbagai persoalan dan tantangan serta dinamika yang terjadi sepanjang tahun 2020-2024. Namun demikian, mengingat dinamisnya perubahan serta adanya tuntutan pengembangan organisasi dan masyarakat, sangat mungkin ada hal-hal yang belum terakomodasi.

Selanjutnya guna mendukung peran strategis BPPSDM dalam melakukan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan maka dibutuhkan peningkatan kelembagaan melalui penataan regulasi dan peningkatan sumber daya KP.

KERANGKA PENDANAAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2020-2024 (Semula)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Riset dan sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan							1.868,2 1,868.1	1.522,6 2.229.0	2.308,1 2.475.9	2.656,3 2.785.0	2.811,6 3,053.2	11.166 12,411
Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							743.8	841.2	885.0	940.9	961.6	4,37
Masyarakat Kelautan dan perikanan yang dilatih							52.0	54.5	57.5	60.5	64.8	28
	Jumlah masyarakat kelautan dan perikana yang dilatih (orang)	25.200	26.000	27.000	28.000	30.000						
Masyarakat Kelatan dan Perikanan yang bersertifikat kompetensi							2.1	3.8	4.5	6.0	9.0	2

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah SDM Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat kompetensi (orang)	3.500	6.250	7.500	10.000	15.000						
Kelompok Palaku Utama/ Usaha yang mendapatkan pendampingan dari penyuluh KP												
	Jumlah kelompok pelaku utama/ usaha yang disuluh (orang)	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000						
Aparatur Kelautan dan Perikanan yang kompeten							8.8	22.7	24.1	25.5	25.5	100.6
	Jumlah aparatur kelautan dan perikanan yang dilatih (orang)	2.280	3.560	3.760	3.960	3.400						
Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							28.5	38.8	43.7	58.4	68.1	239.5

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terstandar (Unit)	7	7	7	7	10						
Percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan yang diretapkan							2.8	3.4	4.6	6.1	6.7	2
	Jumlah percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan yang diterapkan (unit)	34	36	48	64	70						
Layanan sarana dan prasarana internal							0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	1	1	1	1	1						
Layanan Pendidikan dan Pelatihan							3.5	6.6	6.6	6.6	6.6	2
	Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan (layanan)	1	1	1	1	1						
Layanan dukungan manajemen satker							6.1	12.7	12.7	12.7	12.7	5

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker (layanan)	1	1	1	1	1						
Layanan perkantoran							549.0	588.4	617.9	648.7	648.7	3.05
	Jumlah layanan perkantoran	1	1	1	1	1						
	Gaji dan tunjangan (bulan)	12	12	12	12	12	527.8	554.2	582.0	611.0	609.3	2.88
	Operasioanl dan pemeliharaan kantor (bulan)	12	12	12	12	12	21.2	34.2	35.9	37.7	39.5	16
Pendidikan kelautan dan Perikanan							590.8	716.6	769.9	880.4	983.9	3.94
Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten							116.8	210.9	243.1	260.0	275.0	1.15
	Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan	8.293	9.173	10.633	12.286	13.115						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	perikanan yang kompeten (orang)											
Pengabdian pendidikan tinggi							3.9	5.0	7.5	8.0	10.0	33.4
	Jumlah pengabdian aparat KKP (orang)	17	17	17	17	17						
Pendidikan aparat KKP							12.7	19.8	21.9	24.6	25.6	104.6
	Jumlah pendidikan aparat KKP (orang)	195	230	235	240	250						
Sarana dan prasarana pendidikan KP							118.2	136.6	142.7	153.8	160.0	711.3
	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan KP (unit)	21	22	22	22	22						
Layanan pendidikan dan pelatihan							4.0	10.7	12.9	14.4	15.9	57.9
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker (layanan)	1	1	1	1	1						
Layanan dukungan manajemen satker							13.3	26.1	28.6	31.7	34.9	134.6

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker (layanan)	1	1	1	1	1						
Layanan perkantoran							271.9	307.5	313.2	387.9	462.5	1.74
	Jumlah layanan perkantoran (layanan)	1	1	1	1	1						
	Gaji dan tunjangan (bulan)	12	12	12	12	12	197.3	215.5	219.3	236.3	253.2	1.12
	Operasioanl dan pemeliharaan kantor (bulan)	12	12	12	12	12	74.5	92.0	93.9	151.6	209.3	62
Dukungan Manajamen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BRSDM KP							71.1	73.1	79.7	87.9	87.9	39
Layanan dukungan manajemen Eselon I							28.5	31.2	35.4	42.1	42.1	17
	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	72	72	72	72	72						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BRSDM (%)	82	84 82	86 82	88 82	90 82						
	Nilai Kinerja pelaksanaan reformasi Birokrasi lingkup BRSDM (nilai)	34 29	34,5 30	35 31	35,5 32	36 33						
	Nilai AKIP (nilai)	86 A (85)	86,15 A (85)	86,25 A (85)	86,5 A (85)	86,75 A (85)						
	Level Maturitas SPIP (level)	3	3	3	3	3						
	Nilai IKPA Lingkup Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup BRSDM (nilai)	Baik (88)	89 Baik (88)	89 Baik (88)	90 Baik (88)	90 Baik (88)						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRSDMKP dibandingkan dengan realisasi anggaran (%)	1	1	1	1	1						
Layanan Sarana dan Prasarana Internal							3.5	1.7	1,9	2.1	2.1	1
	Tersedianya sarana dan prsarana sekretariat BRSDM KP (layanan)	1	1	1	1	1						
Layanan Perkantoran							39.1	40.3	42.5	43.8	43.8	20
	Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan lingkup Sekretariat BRSDMKP (bulan)	12	12	12	12	12	13.8	15.8	17.0	18.3	18.3	8

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Sekretariat BRSDMKP (bulan)	12	12	12	12	12	25.3	24.5	25.5	25.5	25.5	125.3
Riset Perikanan							279.2	384.2	512.8	629.9	753.6	2.550.7
Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Perikanan							3.2	3.4	3.9	4.2	4.3	18.0
	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil riset perikanan (paket)	15	15	18	20	20						
Data dan/atau informasi stok sumberdaya perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP)NRI							20.0	25.0	28.2	30.8	33.5	137.5
	Jumlah data dan/atau informasi stok sumberdaya perikanan di wilaya pengelolaan perikanan (WPP) NRI	11	11	11	11	11						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan di perairan umum daratan (PUD)							4.2	5.0	6.5	8.2	8.2	3
	Jumlah data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan umum darata (PUD)	8	10	12	14	14						
Teknologi hasil riset perikanan							13.2	20.0	22.0	24.0	26.0	10
	Jumlah teknologi hasil riset perikanan (paket)	23	30	30	30	30						
Penerapan teknologi adaptif lokasi (TAL) hasil riset perikanan							1.8	2.3	2.8	3.3	3.5	1
	Jumlah penerapan teknologi adaptif lokasi (TAL) hasil riset perikanan (inovasi)	3	6	9	9	9						
Sarana dan Prsarana Riset Perikanan							18.7	32.0	39.3	37.0	43.3	17

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah sarana dan prasara riset perikanan (unit)	10	12	12	12	12						
Produk Biologi Hasil Riset Perikanan							5.9	6.0	6.4	6.7	7.0	3
	Jumlah produk bilogi hasil riset perikanan (paket)	15	15	16	17	18						
Data dan/atau informasi hasil risey perikanan							4.5	6.1	6.4	6.7	6.9	3
	Data dan/atau informasi hasil risey perikanan (paket)	10	11	11	11	11						
Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset Perikanan							1.1	1.1	1.7	1.7	1.7	
	Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset Perikanan (paket)	2	2	3	3	3						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Produk Riset Alat dan Mesin Hasil Riset Perikanan Siap Guna							1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	
	Jumlah Alat dan Mesin Hasil Riset Perikanan Siap Guna	2	2	3	3	3						
Layanan dukungan manajemen satker							8.1	10.4	11.7	12.9	14.2	5
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker (layanan)	1	1	1	1	1						
Layanan perkantoran							197.97	270.00	380.00	490.00	600.00	1.935.
	Jumlah layanan perkantoran	1	1	1	1	1						
	Gaji dan tunjangan (bulan)	12	12	12	12	12	137.60	200.00	300.00	400.00	500.00	1.537.
	Operasional dan pemeliharaan kantor (bulan)	12	12	12	12	12	58.37	70.00	80.00	90.00	100.00	398.
Riset Kelautan							115.1	134.8	142.2	156.2	172.0	72

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Data dan/atau informasi pemetaan sumberdaya kawasan pesisir							3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	25.0
	Jumlah Data dan.atau informasi pemetaan sumberdaya kawasan pesisir (kawasan)	8	10	10	12	12						
Data dan/atau informasi pemetaan karakteristik dan dinamika laut di WPP							1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	10.0
	Jumlah Data dan/atau informasi pemetaan karakteristik dan dinamika laut di WPP (paket)	2	2	3	3	3						
Sarana dan prasarana riset kelautan							33.2	43.0	40.2	42.2	48.6	207.2
	Jumlah Sarana dan prasarana riset kelautan (unit)	7	7	7	7	7						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Prototipe alat dan mesin hasil riset dan perekayasaan kelautan							2.0	2.0	3.6	3.6	3.6	1
	Jumlah Prototipe alat dan mesin hasil riset dan perekayasaan kelautan (paket)	4	4	6	6	6						
Alat dan Mesin Hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan Siap Guna							0.5	0.6	0.8	1.5	1.5	
	Jumlah Alat dan Mesin Hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan Siap Guna (paket)	1	1	1	2	2						
Rekomendasi kebijakan hasil riset kelautan							1.8	2.8	3.2	4.5	5.0	1
	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil riset kelautan (paket)	1	1	2	4	4						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Sarana dan prasarana riset data satelit radar							13.9	15.0	18.0	19.0	22.0	87.9
	Jumlah Sarana dan prasarana riset data satelit radar (scene)	500	500	500	500	500						
Sarana dan prasarana stasiun bumi penerima data satelit radar							4.4	5.5	6.5	8.0	8.5	32.9
	Jumlah Sarana dan prasarana stasiun bumi penerima data satelit radar (unit)	1	1	1	1	1						
Layanan penelitian dan pengembangan							0,5	0.5	0.6	0.6	0.6	2.8
	Jumlah Layanan penelitian dan pengembangan (layanan)	1	1	1	1	1						
Layanan dukungan manajemen satker							2.4	5.6	6.7	8.1	9.0	31.8

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Layanan dukungan manajemen satker (layanan)	1	1	1	1	1						
Layanan perkantoran							51.73	53.50	54.00	57.00	60.00	276.23
	Jumlah Layanan perkantoran (layanan)	1	1	1	1	1						
	Gaji dan tunjangan (bulan)	12	12	12	12	12	26.73	27.50	27.50	27.50	27.50	136.73
	Operasioanl dan pemeliharaan kantor (bulan)	12	12	12	12	12	25.00	26.00	26.50	29.50	32.50	139.50
Riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan							44.8	51.3	55.6	56.8	58.2	266.7
Rekomendasi kebijakan hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi KP							1.3	1.5	1.6	1.7	1.8	7.9
	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil riset	7	7	7	7	7						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	pengolahan produk dan bioteknologi KP											
Teknologi Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan							2.5	3.4	4.4	5.4	6.4	22.1
	Jumlah Teknologi Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (paket)	6	6	7	7	7						
Data dan/atau informasi hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi KP yang dihasilkan							1.8	2.0	2.1	2.2	2.3	10.4
	Jumlah Data dab/atau informasi hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi KP	5	5	5	5	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	yang dihasilkan (paket)											
	Sarana dan prasarana riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan						8.3	10.0	12.0	10.0	8.0	48.3
	Gaji dan tunjangan (bulan)	12	12	12	12	12	11.64	11.27	12.09	13.01	14.09	62.11
	Operasioanl dan pemeliharaan kantor (bulan)	12	12	12	12	12	2.13	2.58	2.84	3.12	3.41	14.09

KERANGKA PENDANAAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2020-2024 (Menjadi)

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Ke
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.471.584	
Program Dukungan Manajemen			1.098.289	
Sasaran Program 10	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BPPSDM		1.098.289	BPPSDM
	Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkungan BPPSDM (Unit)	16		
	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤0,5		
	Indeks profesionalitas ASN BPPSDM (Indeks)	79,00		
	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	77,00		
	Nilai Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (Nilai)	3,30		
	Persentase unit kerja BPPSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94,00		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM (%)	80,00		
	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik BPPSDM (%)	76,00		
	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran BPPSDM (Nilai)	93,76		
	Nilai kinerja anggaran BPPSDM (Nilai)	86,00		

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Kerja
	Tingkat kepatuhan BMN BPPSDM (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup BPPSDM (%)	80,00		
	Pendidikan dan pelatihan aparatur (Orang)	5423		
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			1.084.289	Sekretariat BPPSDM
Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya layanan dukungan manajemen di lingkungan BPPSDM			
	Indeks profesionalitas ASN BPPSDM (Indeks)	79,00		
	Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkungan BPPSDM (Unit)	16		
	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤0,5		
	Penilaian mandiri SAKIP BPPSDM (Nilai)	77,00		
	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP BPPSDM (Nilai)	3,30		
	Persentase unit kerja BPPSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94,00		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM (%)	80,00		
	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di Lingkup BPPSDM (%)	76,00		
	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran BPPSDM (Nilai)	93,76		
	Nilai kinerja anggaran BPPSDM (Nilai)	86,00		

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Ke
	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BPPSDM (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BPPSDM (%)	80,00		
Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana BPPSDM tepat waktu (%)	100,00		
Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya Layanan Perkantoran			
	Persentase pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan lingkup BPPSDM tepat waktu (%)	100,00		
	Persentase pemenuhan layanan perkantoran BPPSDM tepat waktu (%)	100,00		
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP			14.000	Pusat Pendi KP Pusat Peli KP
Sasaran Kegiatan	Jumlah aparatur yang dididik dan dilatih			
	Aparatur KKP yang diberikan beasiswa (Orang)	190		
	Aparatur KKP yang diberikan izin belajar (Orang)	68		
	Aparatur KKP yang mendapat pendidikan dan pelatihan (Diklat) (Orang)	5165		
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan			1.000	BBRSE

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Ke
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan			
	Rekomendasi kebijakan responsif sosial ekonomi kelautan dan perikanan (Rekomendasi Kebijakan)	8		
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			372.295	BPPSD
Sasaran Program	SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri			
	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap di Dunia usaha dan Dunia Industri/DUDI (%)	72,00		
Sasaran Program	SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)			
	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) (Orang)	392		
Sasaran Program	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan			
	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (Kelompok)	3000		
	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	2000		
Sasaran Program	Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat			
	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) yang Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Kelautan dan Perikanan	15		

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Ke
Sasaran Program	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan kapasitasnya			
	Sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	53		
Pendidikan Kelautan dan Perikanan			199.000	Pusat Pendi KP
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten			
	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	8020		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Pengabdian Pendidikan Tinggi KP			
	Pengabdian kepada masyarakat kelautan dan perikanan (Kelompok Masyarakat)	14		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Kajian Pendidikan Tinggi KP			
	Penelitian terapan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan (Kajian)	23		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan KP yang Terstandar			
	Peralatan dan mesin pendidikan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	21		
	prasarana pendidikan tinggi kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	9		

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Ke
	prasarana pendidikan mengah kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3		
	sarana teknologi informasi dan komunikasi pendidikan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	9		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pendidikan KP			
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Kelautan Perikanan (NSPK)	5		
Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			173.295	Pusat Peny KP Pusat Pel KP
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan			
	Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih (Orang)	35173		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan			
	Masyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikat Kompetensi (Orang)	1450		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP			
	Kajian inovasi yang diterapkan untuk pelatihan kelautan dan perikanan (Kaji Terap)	8		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Ke
	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan yang disuluh (Kelompok)	47000		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP			
	Inovasi yang diterapkan untuk penyuluhan kelautan dan perikanan (Kelompok masyarakat)	49		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
	Sarana dan prasarana pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	11		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP			
	Norma, standar, prosedur dan kriteria pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan (NSPK)	8		

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN
PERIKANAN,

I NYOMAN RADIARTA